

**KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND DALAM  
MENANGGULANGI PARIWISATA SEX TAHUN 2014-2018**

**Oleh : Dina Octavia**

email : octadinavia@gmail.com

**Pembimbing : Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP, M.Si,**

Bibliografi : 14 Jurnal, 18 Buku, 5 Artikel, Website, 2 Skripsi

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*Tourism sector is one of priority sector in Thailand that supports the biggest income of this country. But, the massive tourism development in Thailand also has tight relation by increasing the prostitution level. Sex tourism becomes one of phenomenon that brings it to the dilemma position. Although it becomes the income source for Thailand, but the negative impact occurs such as HIV/AIDS, human trafficking, and bad image of Thailand. Those things makes Thailand's government implement the work program of image re-branding of tourism sector. The method used in this research is qualitative descriptive. This research uses secondary data by using library research. This study uses Postmodernism Perspective Level of Interest Group, and Theory of Constructivism. The result of this research is Thailand has implemented various ways of public diplomacy effort to pay attention of tourist so that they forget Thailand's image as sex tourism country. From various ways that have been done by Thailand, it has not lost the negative image of Thailand from international perspective, but Thailand has obtained various international awards in tourism sector that becomes representation of its achievement.*

**Keywords: Sex Tourism, Thailand, International Tourism**

## PENDAHULUAN

Pariwisata di Thailand merupakan salah satu industri yang menyumbangkan devisa terbesar di negara mereka, namun *image* industri pariwisata di Thailand juga tidak semua nya positif, bahkan Thailand menggunakan diplomasi publik ini untuk mengembalikan citra positif pariwisata nya di mata dunia.<sup>1</sup> Thailand merupakan negara yang posisi nya sangat strategis karena berada di pusat kawasan Asia Tenggara, Thailand juga merupakan gerbang Asia Tenggara dimana jika wisatawan yang datang ke Thailand akan dengan mudahnya untuk mengunjungi negara - negara sekitarnya. Bahkan *ASEAN Tourism Forum* (ATF) sangat yakin bahwa Thailand akan menjadi gerbang untuk para wisawatan asing untuk datang mengunjungi kawasan Asia Tenggara.

Namun, dengan semua keuntungan ini, ternyata Thailand juga mendapatkan beberapa tantangan yang menjadikan sektor pariwisata di negara ini tidak berkembang dengan baik bahkan tidak banyak wisatawan yang tahu bahwa Thailand itu adalah salah satu negara yang patut dikunjungi sekitar 20-30 tahun kebelakang.<sup>2</sup>

Pemerintah Thailand masih kesulitan dalam mengembangkan sektor pariwisata mereka walaupun sebenarnya sumber daya alam mereka sangat kaya, terdapat banyak sekali objek-objek wisata yang bisa dimanfaatkan untuk menarik wisatawan. Sumber daya manusia mereka juga tidak bisa dikesampingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 69.265.773 bukan tidak mungkin untuk mengembangkan sektor dinamis ini. Tetapi ternyata masalah di masa lalu adalah sebuah ketakutan besar bagi pemerintah Thailand untuk mempromosikan negara nya ke dunia internasional. Pemerintah juga masih kesulitan untuk menghapus citra negatif sektor pariwisata mereka yang sudah melekat di mata dunia.

Wisata seks atau dikenal dengan *sex tourism* di Thailand telah menimbulkan citra negatif dan masih menjadi problematika yang harus dihadapi oleh semua kalangan di Thailand, baikmenyebutkan bahwa saat ini pariwisata termasuk kedalam industri terbesar di dunia yang sudah menghasilkan pendapatan dunia lebih dari USD 3,5 triliun pada tahun 1993.

<sup>1</sup> Boonchalaksi, W. and Guest, P. Prostitution in Thailand. Nkhonpathom: Institution for Population and Social Research, Mahidol University, (1994).

<sup>2</sup> Garrick, Damien. 'Excuses, Excuses: Rationalisations of Western Sex Tourists in Thailand.' *Current Issues in Tourism* 8.6 (2005): 497-509.

Salah satu negara yang berada di kawasan Asia Pasifik dimana menjadi suatu kawasan yang akan mendapatkan banyak kunjungan di tahun 2020 dan bersiap untuk menyambut para wisman untuk datang ke negara mereka adalah Thailand.<sup>3</sup>

Meskipun pada akhirnya pemerintah Thailand mengilegalkan industri ini di tahun 1960, namun nyata nya wisatawan mancanegara sudah terlanjur mengenal Thailand sebagai negara yang mereka akan kunjungi jika mereka butuh seks dalam perjalanannya. Hal ini membuat semakin banyak pekerja seks yang dibutuhkan dilapangan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Pada tahun 2015 situs Havoscope mencatat ada 250,000 pekerja seks di Thailand dan menghasilkan sekitar 6,4 miliar dolar Amerika sepanjang tahun itu.<sup>4</sup>

Banyaknya informasi mengenai wisata seks di internet, menjadikan Thailand semakin terkenal di seluruh dunia dengan daya tarik nya tersebut, hal ini ternyata banyak menimbulkan kritik yang dilontarkan kepada pemerintah Thailand. Thailand dinilai sebagai negara yang masalah nya paling buruk terkait perdagangan seks, karena banyak orang berpikir bahwa mereka menyediakan akses mudah ke semua jenis layanan itu karena industri seks pun sudah menjadi daya tarik tersendiri di Thailand.

Pemerintah dianggap tidak korperatif dengan undang-undang yang mereka buat. Thailand juga telah lama menjadi “ibukota seks dunia”. Pemerintah Thailand di anggap telah melakukan *human and sex trafficking* terhadap wanita dan anak dibawah umur yang menjadi pekerja seks baik di dalam maupun di luar negeri.

*U.S Department of State* pada tahun 2005 mencatat ada 30,000- 40,000 prostitusi anak di bawah umur 18 tahun di Thailand, 40% dari

<sup>3</sup> Lawrence, R. D. *The Pole Dancer*. Bangkok: Bangkok Books, (2010).

<sup>4</sup> Nuttavuthisit, Kritinee. ‘Branding Thailand: Correcting the Negative Image of Sex Tourism.’ *Place Branding and Public Diplomacy* 3 (2007): 21

total keseluruhan pekerja prostitusi di Thailand.<sup>5</sup>

Wisata seks memang menghasilkan devisa dalam jumlah besar, namun bukan berarti kalau sektor ini adalah sektor yang akan terus diandalkan oleh pemerintah Thailand. Mendapat teguran dari beberapa pihak, juga penurunan jumlah wisatawan membuat pemerintah Thailand sedikit khawatir akan perkembangan industri pariwisata nya ini. Thailand juga diminta untuk merubah citra pariwisata nya menjadi pariwisata yang bersih dan lebih positif. Demi mewujudkan kepentingan nasional nya sebagai negara yang mendapat kunjungan terbesar di Asia maupun dunia, maka pemerintah Thailand merubah cara pandangan mereka dalam sektor pariwisata ini.

Hal tersebut yang menjadi penting bagi negara Thailand untuk segera diatasi, dan ini didukung oleh pernyataan Menteri Pariwisata Thailand sebelumnya yaitu Kobkarn Wattanavrangkul yang menyatakan, “*We want Thailand to be about quality tourism. We want the sex industry gone*” yang diartikan bahwa pemerintah Thailand ingin menciptakan wisata yang berkualitas dan ingin menghilangkan industri seks dari negara mereka.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti “**Kebijakan Pemerintah Thailand Dalam Menanggulangi Pariwisata Sex Tahun 2014-2018**”.

Perspektif yang digunakan dalam bahasan ini adalah perspektif konstruktivisme. **Kaum konstruktivisme**, seperti kaum posmodernisme, berpendapat bahwa tidak ada kenyataan sosial objektif, eksternal seperti itu. Pemikiran kuncinya adalah bahwa dunia sosial, termasuk hubungan internasional, merupakan suatu konstruksi manusia.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Ibid, hal. 30

<sup>6</sup> Truong, T. D. *Sex, Money and Morality: Prostitution and Tourism in Southeast Asia*. London: Zed, (1990).

<sup>7</sup> *Op.cit* Hal 307

Konstruktivisme merupakan metodologi lama yang dapat dilacak kembali paling tidak pada tulisan abad ke delapan belas dari Giambattista Vico. Salah satu teoritis konstruktivisme adalah Alexander Wendt. Wendt beranggapan bahwa, “anarki adalah apa yang dibuat negara darinya”.<sup>8</sup> Menurut konstruktivis, dunia social bukanlah sesuatu yang *given*; dunia social bukanlah sesuatu “di luar sana” yang hukum-hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah, seperti yang dikemukakan kaum behavioralis dan kaum positivis. Melainkan, dunia social merupakan wilayah *intersubjektif*; dunia social sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya, dan yang memahaminya.<sup>9</sup> Dunia social dibuat atau dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif- analitis. Dimana dalam penelitian kualitatif mempunyai konsep dasar penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>10</sup> Metode dengan memperhatikan perilaku aktor-aktor internasional dengan menghubungkan sebab akibat yang terjadi dengan menggunakan teknik kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deduktif dengan sifat deskriptif analitis dan pengumpulan data dari berbagai literatur berupa buku, koran, majalah, jurnal dan internet yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dikemukakan penulis.

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal 308

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal 307

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 2. lihat pada Sumarlan, 2016, *Upaya Jaringan NGO International Pops Elimination Network (IPEN) Mengatasi Masalah Penggunaan Merkuri Di Indonesia*, Skripsi Strata-1, Universitas Riau: Pekanbaru.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini melalui **data primer** dimana sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui teknik *library research*, penulis memanfaatkan buku-buku, jurnal, artikel-artikel dan berita-berita yang berasal dari berbagai media.

## PEMBAHASAN

### Upaya Pemerintah Thailand Merubah Citra Thailand sebagai Sex Tourism Country

#### 1. Program Konseling Pendidikan dan Pekerjaan terhadap Pekerja Sex Thailand

Ada sejumlah kesalahpahaman tentang perdagangan seks. Perdagangan seks dan perdagangan manusia tidak harus disamakan dengan penyelundupan manusia. Perdagangan manusia untuk pekerjaan seksual atau lainnya mungkin melibatkan pengangkutan korban melintasi perbatasan internasional, tetapi untuk memenuhi definisi perdagangan, hanya perlu ada eksploitasi terhadap seseorang setelah mereka dipaksa atau ditipu, sehingga tidak harus melibatkan transportasi lintas batas negara.<sup>11</sup>

Perdagangan manusia dan perdagangan seks sering digunakan sebagai sinonim.

<sup>11</sup> nancy.cao. "UNODC - Perdagangan Manusia". [www.unodc.org](http://www.unodc.org), diakses 11 Desember 2019

Namun, perdagangan untuk eksploitasi non-seksual bahkan mungkin lebih lazim daripada perdagangan untuk eksploitasi seksual, meskipun perkiraan akurat tentang tingkat perdagangan sangat sulit diperoleh.<sup>12</sup>

Perdagangan seks cenderung menerima lebih banyak perhatian dari organisasi bantuan dan donor karena kemarahan publik yang lebih besar yang ditimbulkan oleh kerja paksa seksual dibandingkan dengan kerja paksa non-seksual dan dengan demikian insiden perdagangan seks lebih sering dilaporkan.

Perdagangan seks juga umumnya dipadukan dengan pekerjaan seks tanpa paksaan yang dikriminalisasi sebagai pelacuran. Kesalahpahaman ini seringkali berakar dari tidak dilaporkannya perdagangan orang karena ketakutan para penyintas tentang pedagang mereka, definisi hukum yang terus berubah dari apa yang memenuhi syarat sebagai perdagangan seks dan pelacuran, dan pandangan yang bertentangan tentang perdagangan dan kerja seks.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> ZHANG, SHELDON X.; SPILLER, MICHAEL W.; FINCH, BRIAN KARL; QIN, YANG (2014). "Memperkirakan Perdagangan Tenaga Kerja di antara Pekerja Migran Tidak Resmi di San Diego". *The Annals of American Academy of Political and Social Science*.

<sup>13</sup> Monroe, Jacquelyn (2005-09-27). "Perempuan dalam Prostitusi Jalanan: Hasil Kemiskinan dan Terberatnya Ketimpangan". *Jurnal Kemiskinan*. 9 (3): 69-88.

Selain itu, beberapa peneliti berpendapat bahwa penelitian utama yang menggarisbawahi perdebatan ini adalah cacat untuk meninggalkan pekerja seks dan korban perdagangan seks keluar dari percakapan. Cendekiawan lain berpendapat bahwa keduanya umumnya disatukan karena hubungan yang melekat antara prostitusi berdasarkan kehendak dan perdagangan seks. Mereka yang berpendapat ini percaya bahwa seks komersial meningkatkan permintaan untuk layanan seksual dan akibatnya meningkatkan perdagangan seks.<sup>14</sup>

Beberapa program dan inisiatif anti perdagangan seks telah dikritik karena berkontribusi terhadap kesalahpahaman ini karena mereka memberikan insentif kepada pekerja seks yang tidak diperdagangkan untuk diidentifikasi sebagai korban perdagangan, seperti mendapatkan akses ke sumber daya seperti tempat penampungan. Lembaga penegak hukum telah dikritik karena memberikan insentif serupa, karena mereka mengancam tersangka pelacur dengan hukuman penjara jika mereka mengakui

<sup>14</sup> Outshoorn, J (2005). "Debat Politik tentang Prostitusi dan Perdagangan Perempuan". *Politik Sosial: Studi Internasional di Gender, Negara Bagian dan Masyarakat*. 12 (1): 141-155.

bahwa mereka bekerja berdasarkan pilihan, sementara mereka yang mengaku sebagai korban perdagangan manusia mendapatkan lokakarya pelatihan dan layanan sosial alih-alih waktu penjara. Kebijakan semacam itu, meskipun bermanfaat bagi para korban perdagangan orang, meningkatkan tingkat perdagangan yang dilaporkan.<sup>15</sup>

Banyak sarjana feminis bertentangan dengan pandangan mereka tentang perdagangan manusia dan pekerjaan seks. Ada dua kerangka kerja dominan yang menunjukkan perbedaan: wacana abolisionis, yang berasal dari teori dominasi feminis, dan wacana kerja seks. Dalam wacana abolisionis berpendapat bahwa semua prostitusi dipaksakan karena prevalensi heteroseksualitas wajib dan tekanan sosial dan ekonomi yang berasal dari Neoliberalisme dan patriarki. Argumen ini membingkai perempuan sebagai korban perbudakan seksual dan menganggap seksualitas laki-laki sebagai masalah.<sup>16</sup>

Wacana abolisionis seringkali bertentangan dengan wacana kerja seks. Kerangka kerja ini memandang pekerja seks sebagai pekerja mandiri, wirausaha yang bekerja secara consensus dengan pihak ketiga

<sup>15</sup> *effreys, Sheila (Juli 2009). "Prostitusi, perdagangan manusia, dan feminisme: Pembaruan debat". Forum Internasional Studi Wanita. 32 (4): 316–320*

<sup>16</sup> *Knight, KR (2012). "Kehidupan Publik dari Pekerja Seks". Ulasan Humaniora Barat. 66 (3): 55-76*

seperti rumah bordil dan pemilik klub dan melihat upah yang lebih tinggi dan fleksibilitas tenaga kerja seksual lebih disukai daripada upah yang lebih rendah dan pekerjaan umum yang tidak fleksibel di mana mereka tunduk pada hubungan seksual. pelecehan dan penyerangan oleh majikan laki-laki dan kolega. Pandangan ini juga melihat kerja seks sebagai cara bertahan hidup mengingat distribusi kekayaan dan kemiskinan yang tidak merata, serta akibat faktor struktural seperti rasisme, klasisisme, dan seksisme, bukan hanya hasil dari seksualitas dan nafsu pria.

Di sisi abolisionis dalam debat, sejumlah organisasi aktivis berusaha memberikan layanan kepada para korban perdagangan manusia, melobi undang-undang anti-perdagangan manusia, dan meningkatkan kesadaran publik tentang perdagangan seks. Para aktivis ini sering menganjurkan kriminalisasi kerja seks sukarela juga. Di sisi wacana kerja seks dalam debat, para advokat berdebat untuk mengurangi stigmatisasi prostitusi, memperbaiki kondisi kerja, dan layanan sosial yang dapat diakses. Beberapa pendukung ekstrem di sisi ini dari lobi debat untuk dekriminasi pelacuran karena dianggap sebagai pilihan profesi yang sah dan otonom.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> *Dempsey, Michelle Madden; Hoyle, Carolyn; Bosworth, Mary (2012). "Mendefinisikan Perdagangan Manusia dalam Hukum Internasional dan Domestik: Pikirkan Kesenjangan". Tinjauan Hukum Internasional Emory. Villanova Law / Makalah Penelitian Kebijakan Publik.*

Beberapa cendekiawan feminis ketiga menggabungkan aspek-aspek dari kedua kerangka kerja untuk menciptakan lensa teoretis baru untuk melihat perdagangan seks dan pelacuran. Kerangka kerja ketiga menegaskan bahwa perdagangan seks dan pelacuran adalah bentuk dominasi dan eksploitasi berbasis seks, namun mereka juga memberikan ruang bagi beragam pengalaman perempuan dengan industri-industri ini. Di bawah kerangka kerja ini, perdagangan seks maupun pelacuran bukanlah masalah monolitik dan sering bersinggungan dengan bentuk penindasan lainnya tetapi juga dapat melibatkan pilihan otonom.

Lensa teoretis ini mengadvokasi reformasi penyelidikan dan pelacuran polisi, meningkatkan ketersediaan tenaga kerja dan layanan sosial di luar pekerjaan seks untuk mengurangi kemungkinan memasuki industri, dan memasukkan suara perempuan dalam percakapan terkait intervensi. Kesalahpahaman ini sering menyebabkan penegakan hukum salah mengidentifikasi perdagangan seks sebagai pelacuran dan sebaliknya.

Bentuk perdagangan ini juga sangat umum terhadap keluarga di Thailand. Mendapati diri mereka dalam situasi di mana hutang atau tradisi menuntut penjualan orang yang dicintai, paling sering perempuan. Di

Thailand ada tradisi yang dikenal sebagai *bhun kun*, yang menetapkan putri bungsu sebagai orang yang bertanggung jawab secara finansial terhadap orang tuanya saat mereka bertambah tua. Penulis Kara Siddharth mewawancarai seorang korban Thailand yang menyatakan bahwa, meskipun ia membenci laki-laki yang bersamanya, “ia bangga memenuhi tugasnya kepada orangtuanya dalam bentuk pembayaran kecil yang dikirim oleh pemilik rumah bordil kepada ayahnya setelah hutang perdagangannya dilunasi”. Ini hanyalah salah satu dari banyak negara yang kelas bawahnya beralih ke bentuk penghasilan ini. Banyak anak dijual untuk membayar hutang, atau hanya untuk menaruh makanan di atas meja untuk keluarga mereka selama sebulan.<sup>18</sup>

Di Thailand pekerja seks memiliki organisasi nasional bernama *Empower Foundation* sebuah *grass root organization* yang membantu pekerja seks untuk mendapatkan hak asasi manusia serta pengakuan atas status pekerja seks, organisasi ini sepenuhnya dikelola oleh pekerja seks, untuk memaksimalkan tujuannya *Empower Foundation* ikut berinteraksi dengan aktor-aktor regional dan internasional,

<sup>18</sup> Kara, Siddharth (2010). *Perdagangan Seks: Suatu Tinjauan*. New York: Columbia University Press. hlm. 1–44.

*Empower Foundation* menjadi salah satu anggota pendiri *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) yaitu jaringan advokasi regional, keduanya memiliki misi yang sama.

Pekerja seks sering dikaitkan dengan perdagangan manusia yang tergolong dalam *transnational crime*, *Empower Foundation* untuk pekerja seks di Thailand yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan advokasi.

*Empower Foundation* juga mengelola perpustakaan online di <https://www.empowerlibrary.online>.<sup>19</sup>

Program pendidikan yang diberikan oleh *Empower Foundation* diterapkan di setiap kantor cabang *Empower Foundation* seluruh Thailand, pendidikan yang diberikan meliputi pengetahuan hak asasi manusia, keadilan, dan saling berbagi pengalaman sesama pekerja seks.

Pelajaran lainnya yakni membaca dan menulis sebab banyak dari pekerja seks yang tidak memahami huruf, selanjutnya pembelajaran bahasa, *Empower Foundation* dibentuk awalnya hanya menawarkan keterampilan bahasa Inggris kepada para pekerja seks, sebaliknya Mrs. Chantawipa Apisuk selaku pendiri *Empower Foundation* mendapatkan kesempatan untuk belajar dari pekerja seks bagaimana masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya, pembelajaran bahasa ini bermanfaat untuk pekerja seks berinteraksi dengan turis.

Program bahasa Inggris awalnya dikoordinasi oleh *Empower Foundation* di Bar Patpong, Bangkok, seiring berjalannya waktu

<sup>19</sup> APN +, ANPUD, APNSW, Youth Lead & CARAM Asia. 201. Letter to Global Fund SII C on the New Funding Model by Asia Pacific Community Networks.

permintaan kelas bahasa Inggris khusus untuk pekerja seks mengalami peningkatan, akhirnya Mrs. Chantawipa Apisuk selaku pendiri *Empower Foundation* menyewa tempat untuk membuka kelas. Dari kelas-kelas bahasa ini, Mrs. Chantawipa Apisuk selaku pendiri *Empower Foundation* bersama pekerja seks membentuk *Moolniti Songserm Okard Pooying* yakni pendidikan pemberdayaan perempuan. Pembelajaran selanjutnya yakni keterampilan, *Empower Foundation* memberikan pembelajaran seperti menjahit dan kerajinan tangan lainnya, yang mana nantinya akan dijual untuk menambah pendapatan pekerja seks.<sup>20</sup>

## **2. Meningkatkan Infrastruktur, Pelayanan Publik, Hiburan dan Rekreasi Atraksi**

Komponen kolektif ini memberikan kesempatan bagi Thailand untuk bersaing di pasar global. Thailand memiliki keuntungan dari berbagai wisata alam yang beragam, terdiri dari pegunungan, hutan, air terjun, sungai dan pantai, dikombinasikan dengan sejarahnya dan budaya yang kaya. Thailand juga menawarkan segala bentuk tradisional dari Thailand.

Perayaan tradisional dan kegiatan untuk menikmati kemeriahan Thailand ditawarkan dan dikelola sedemikian rupa sehingga wisatawan mendapatkan pengalaman yang menarik.

<sup>20</sup> W. Roujanavong. 2012. Human Trafficking: A Challenge to Thailand and the World Community, 150th International Senior Seminar Visiting Experts Paper, Thailand

Ini termasuk tawaran Thailand sebagai salah satu tempat terbaik untuk berbelanja, di mana pengunjung dapat menemukan berbagai pilihan produk dan layanan dengan harga yang wajar. Infrastruktur yang bisa merusak daya tarik Thailand juga diperbaiki, termasuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh atraksi dan kemeriahan serta persoalan sosial seperti kemacetan lalu lintas, polusi dan pengelolaan limbah yang buruk. Meskipun penelitian Branding Thailand menemukan bahwa konsumen (yaitu wisatawan) kurang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dibandingkan dengan atraksi rekreasi dan hiburan, namun pemerintah Thailand terus meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik (misalnya perlindungan terhadap warga, termasuk wisatawan dan propertinya; jaminan sosial dan pendidikan bagi warganya) terus dikembangkan untuk mengakomodasi perluasan industri pariwisata.

Wisata ke Thailand tergolong murah, makanan dan minuman yang dijual di tempat wisata juga tergolong murah, bahkan banyak yang datang ke Thailand hanya untuk mendapatkan barang seperti kaos, tas dengan harga murah, hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah Thailand untuk para pelaku usaha baik UKM yang ada di tempat wisata maupun toko-toko besar.

Seperti di Tiongkok, pemerintah

mewajibkan pihak tur membawa turis asing ke toko-toko seperti ke tempat pengolahan madu (*Big Bee Shop*) dan ke toko batu permata (*Germ Galery*) dengan tujuan agar turis membeli produk andalan mereka tersebut.

Jalan menuju tempat-tempat wisata di Thailand sudah sangat bagus, meskipun di beberapa tempat, seperti di Kota Bangkok tetap tidak terhindar dari kemacetan parah meskipun sudah memiliki *subway* dan *sky train* sebagai transportasi umum. Selain melalui udara, akses menuju destinasi wisata di Thailand bisa melalui laut dan darat, dan di setiap wilayah terdapat tempat wisata yang dapat dikunjungi.

Di tempat wisata di Thailand tidak ditemukan pedagang asongan yang menyodorkan barang dagangan kepada pengunjung, para pedagang tetap berada di tempatnya sambil berteriak menawarkan barangnya, sehingga dengan demikian pengunjung tidak merasa terganggu dan tidak merasa dipaksa untuk membeli.

Selain itu, meskipun dengan kemampuan terbatas, para pedagang bisa berbahasa Indonesia, Inggris maupun Mandarin, sehingga ini memudahkan wisatawan untuk melakukan transaksi saat ingin berbelanja. Jalan menuju tempat-tempat wisata di Thailand sudah sangat bagus, meskipun di beberapa tempat, seperti di Kota Bangkok tetap

tidak terhindar dari kemacetan parah meskipun sudah memiliki *subway* dan *sky train* sebagai transportasi umum.

Terlepas dari pemeran pertunjukan di Alcazar adalah kaum transgender, tetapi aksi yang mereka tunjukkan adalah sebuah pertunjukan kesenian berupa tarian yang dikemas dengan lucu dan menarik, begitu juga dengan pertunjukan di Nong Noch Village, mereka bisa memperoleh pendapatan sambil memperkenalkan seni budaya kepada dunia.<sup>21</sup>

### **3. Mengkomunikasikan Elemen dan Karakteristik Positif Thailand kepada Wisatawan dan Penduduk Lokal**

Pemerintah Thailand pada akhir tahun 2017 mengkampanyekan slogan baru “*Open to the New Shades*” untuk melengkapi “*Amazing Thailand*” yang sudah berusia 20 tahun yang menggambarkan keramahan warga Thailand untuk menyambut tamu dari berbagai belahan dunia. Strategi pemasaran wisata Thailand adalah mengutamakan masyarakat setempat sebagai yang paling mendapatkan manfaat.

Kampanye wisata Thailand membidik generasi milenial dengan konsep padu padan (*mix and match*) yaitu wisatawan muda merancang sendiri destinasi wisata. Selain itu, Thailand juga mengkampanyekan bulan madu,

wisata bagi kalangan lanjut usia, wisata bagi peminat olah raga, wisata khusus perempuan pelancong, wisata khusus kalangan atas, selain wisata keluarga.

Konsep pemasaran wisata Thailand 2018 juga adalah “*go local*” yaitu pengalaman wisatawan dengan kekhasan masyarakat suatu wilayah, mulai dari makanan khas, tidak hanya mencicipi kuliner tapi juga pengalaman mengenai bahan-bahan makanan tersebut dan cara mengolahnya. Wisatawan tidak sebatas melihat suatu tempat tetapi juga merasakan cara hidup bersama masyarakat setempat, hingga berinteraksi dengan tokoh setempat yang dikendalikan oleh

40 kantor yang tersebar di seluruh Thailand. Pemerintah Thailand juga mengumumkan pengurangan pajak di 55 provinsi tujuan wisata pada tahun 2018 untuk memperkuat ekonomi setempat. Thailand juga intensif menggarap pasar ASEAN, dengan strategi meluncurkan buku saku “*Experience Thailand and More*” pada tahun 2018.

Buku saku tersebut berisi 258 halaman yang mengandung tawaran empat pilihan wisata, lengkap dengan *itinerary*, untuk memperkuat konektivitas ASEAN lewat kombinasi tujuan wisata di Thailand dengan negara tetangga.

<sup>21</sup> <http://wonderluhst.net/the-impacts-of-sex-tourism-on-thailand/>, diakses 11 Desember 2019

Wisatawan dapat memilih tema mulai dari “*A Journey to ASEAN Ancient Kingdom*” yang berisi usulan pilihan destinasi wisata terkait dengan kilas sejarah ASEAN bagian utara. Tema lainnya adalah ASEAN Peranakan dan *Nature Trail* menelusuri budaya peranakan seperti masakan, mulai dari Phuket hingga Langkawi dan Penang di Malaysia. Pilihan lainnya adalah *Mekong Active Adventure Trail* untuk wisatawan yang menikmati pengalaman bertualang menelusuri Mekong, mulai dari wilayah Isan di Thailand hingga Kamboja.

Alternatif terakhir namun tidak kalah menarik bertema *ASEAN World Class Culinary and Heritage Cities* bagi mereka yang ingin menikmati kuliner dari berbagai wilayah Thailand hingga Malaysia dan Singapura.<sup>22</sup>

## KESIMPULAN

Pemerintah Thailand sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi citra negatif *sex tourism*nya dan meningkatkan citra positif di negaranya, antara lain dengan menggunakan diplomasi publik melalui pertukaran pelajar sudah membantu untuk mengubah citra *sex tourism country* yang ada di Thailand melalui obrolan dari mulut ke mulut.

---

<sup>22</sup>[www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2019/10/26/tourism-visitors-thailand-figures-western-asian-market-thai-hotels/](http://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2019/10/26/tourism-visitors-thailand-figures-western-asian-market-thai-hotels/), diakses 11 Desember 2019

Dengan perkembangan teknologi di bidang komunikasi juga mempermudah pemerintah Thailand dalam membangun citra positif seluruh masyarakat mancanegara bisa dengan mudah melihat segala macam kelebihan yang ingin ditunjukkan oleh Thailand. Melalui diplomasi publik membuat pemerintah Thailand menjadi lebih mudah dalam memperkenalkan pariwisata, kuliner serta kebudayaan yang ada di Thailand Hal terpenting yang harus dilakukan bagi pemerintah Thailand untuk melawan hambatan yang dihadapi adalah dengan melakukan pengawasan kepada para pihak yang menyebarkan isu *sex tourism* di Thailand. Pengawasan yang dapat dilakukan pemerintah Thailand dapat berupa kerjasama dengan berbagai negara untuk melarang penyebaran informasi buruk khususnya terkait wisata seks di Thailand, agar tidak menjadi hambatan untuk melakukan diplomasi publik melalui international broadcasting. Apabila segala hambatan berupa para pihak yang menyebarkan isu-isu wisata seks di Thailand bisa ditangani secara baik, maka upaya diplomasi publik yang dilakukan pemerintah Thailand bisa lebih cepat dalam menumbuhkan citra positif.

Maka, dari berbagai kendala yang dihadapi Thailand dalam melakukan diplomasi publik untuk merubah *citra sex*

*tourism country*, bukan berarti diplomasi publik sendiri gagal untuk membuat citra positif maupun membantu melengkapi diplomasi formal atau yang dikenal juga sebagai diplomasi jalur pertama. Diplomasi publik telah berhasil membantu Thailand untuk menumbuhkan suatu citra positif di berbagai negara bagi berbagai pihak, walaupun memang kendala-kendala yang dihadapi haruslah bisa disingkirkan untuk tercapainya tujuan seta berjalannya fungsi diplomasi publik dengan baik. Oleh karena segala kendala yang dihadapi dalam menjalankan diplomasi publik, Thailand harus memperketat pengawasan serta tegas dalam menjalankan diplomasi publik, mulai dari pengawasan terhadap peserta pertukaran pelajar yang terarah, pengawasan terhadap segala berita terkait wisata seks di Thailand yang harus dijaga agar tidak semakin

tersebar, bahkan jika diperlukan untuk memberikan bantuan berupa membuat suatu himbauan sedemikian rupa bagi para wisatawan agar tidak melakukan wisata seks di Thailand. Langkah pengawasan lain yang dimungkinkan untuk menghindari terhadanya wisata seks di Thailand adalah dengan mengajak kerjasama kepada seluruh agen travel untuk membantu pemerintah memberikan paket wisata di Thailand agar para wisatawan juga bisa lebih terawasi. Dengan terawasinya para wisatawan di Thailand, maka akan membuat wisata seks menjadi berkurang dikunjungi, sehingga segala praktik wisata seks di Thailand lambat laun bisa menghilang. Apabila praktik wisata seks di Thailand bisa dihilangkan, maka lambat laun juga citra *sex tourism country* yang melekat pada Thailand akan menghilang.

## DAFTAR PUSTAKA

APN +, ANPUD, APNSW, Youth Lead & CARAM Asia. 201. Letter to Global Fund SII C on the New Funding Model by Asia Pacific Community Networks.

Boonchalaksi, W. and Guest, P. Prostitution in Thailand. Nkhonpathom: Institution for Population and Social Research, Mahidol University, (1994).

Dempsey, Michelle Madden; Hoyle, Carolyn; Bosworth, Mary (2012). "Mendefinisikan Perdagangan Manusia dalam Hukum Internasional dan Domestik: Pikirkan Kesenjangan". Tinjauan Hukum Internasional Emory. Villanova Law /

Makalah Penelitian Kebijakan Publik No. 2013-3036. 26 (1).

Effreys, Sheila (Juli 2009). "Prostitusi, perdagangan manusia, dan feminisme: Pembaruan debat". Forum Internasional Studi Wanita. 32 (4): 316-320

Garrick, Damien. 'Excuses, Excuses: Rationalisations of Western Sex Tourists in Thailand.' Current Issues in Tourism 8.6 (2005): 497-509.

Kara, Siddharth (2010). Perdagangan Seks: Suatu Tinjauan. New York: Columbia University Press.

Knight, KR (2012). "Kehidupan Publik dari Pekerjaan Seks". Ulasan Humaniora Barat 66 (3): 55-76

Lawrence, R. D. *The Pole Dancer*. Bangkok: Bangkok Books, (2010).

Monroe, Jacquelyn (2005-09-27). "Perempuan dalam Prostitusi Jalanan: Hasil Kemiskinan dan Terberatnya

Ketimpangan". *Jurnal Kemiskinan*. 9 (3): 69-88.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 2. lihat pada Sumarlan, 2016, *Upaya Jaringan NGO International Pops Elimination Network (IPEN) Mengatasi Masalah Penggunaan Merkuri Di Indonesia*, Skripsi Strata-1, Universitas Riau: Pekanbaru

Nancy.cao. "UNODC – Perdagangan Manusia". [www.unodc.org](http://www.unodc.org) , diakses 11 Desember 2019

Nuttavuthisit, Krittinee. 'Branding Thailand: Correcting the Negative Image of Sex Tourism.' *Place Branding and Public Diplomacy* 3 (2007): 21

Outshoorn, J (2005). "Debat Politik tentang Prostitusi dan Perdagangan

Perempuan". *Politik Sosial: Studi Internasional di Gender, Negara Bagian dan Masyarakat*. **12** (1): 141–155.

Truong, T. D. *Sex, Money and Morality: Prostitution and Tourism in Southeast Asia*. London: Zed, (1990).

W. Roujanavong. 2012. *Human Trafficking: A Challenge to Thailand and the World Community*, 150th International Senior Seminar Visiting Experts Paper, Thailand.

ZHANG, SHELDON X.; SPILLER, MICHAEL W.; FINCH, BRIAN KARL; QIN, YANG (2014). "Memperkirakan Perdagangan Tenaga Kerja di antara Pekerja Migran Tidak Resmi di San Diego". *The Annals of American Academy of Political and Social Science*.

<http://wonderluhst.net/the-impacts-of-sex-tourism-on-thailand/>, diakses 11 Desember 2019

[www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2019/10/26/tourism-visitors-thailand-figures-western-asian-market-thai-hotels/](http://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2019/10/26/tourism-visitors-thailand-figures-western-asian-market-thai-hotels/), diakses 11 Desember 2019